



***Laporan Akuntabilitas Kinerja
BPK Perwakilan Provinsi NTB
Tahun 2015***

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamuálaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua

Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (LAKIP BPK) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. LAKIP BPK tidak hanya mengikat BPK sebagai lembaga, namun juga mengikat unsur-unsur pelaksana BPK RI. LAKIP BPK merupakan cerminan dari pencapaian kinerja unit-unit kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, yang salah satunya adalah BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebagai salah satu pelaksana BPK RI, BPK Perwakilan Provinsi NTB mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi NTB yang merupakan LAK Unit Kerja Eselon II. LAK Unit Kerja Eselon II berisi tentang tugas dan fungsi Perwakilan Provinsi NTB yang merupakan bagian unsur pelaksana Auditor Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) dan sebagai pertanggungjawaban kinerja unit eselon II dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK. LAK BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah dasar penyusunan LAK Pelaksana BPK (LAK Unit Organisasi Eselon I).

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2015 ini akan mengurai tentang perencanaan strategis dan pernyataan komitmen pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB dan akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi NTB yang merupakan evaluasi atas pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Dalam pencapaian Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB, masih di bawah target yang tentunya ini akan menjadi perhatian dan evaluasi sehingga di masa yang akan datang dapat memenuhi seluruh target yang ada.

Demikian, semoga LAK BPK Perwakilan NTB Tahun 2015 ini dapat bermanfaat dan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK.

Wabillahitaufiq wal hidayah
Wassalamuálaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Februari 2016
Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB



Sumardi
NIP 195603061986031005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pemerintah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut antara lain mewajibkan setiap instansi pemerintah, tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 13 yang antara lain menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja adalah ayat (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan ayat (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka BPK sebagai lembaga beserta unsur-unsur pelaksana BPK RI mempunyai kewajiban untuk menyusun LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. Tugas dan Fungsi Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain mengatur bahwa BPK dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana BPK dan memiliki perwakilan di tiap provinsi. BPK Perwakilan Provinsi NTB merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan undang-undang tersebut, dimana Perwakilan Provinsi NTB adalah bagian unsur pelaksana Auditor Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) dan perwujudan keberadaan BPK di Provinsi NTB. AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dan Departemen Pendidikan Nasional serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan

pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

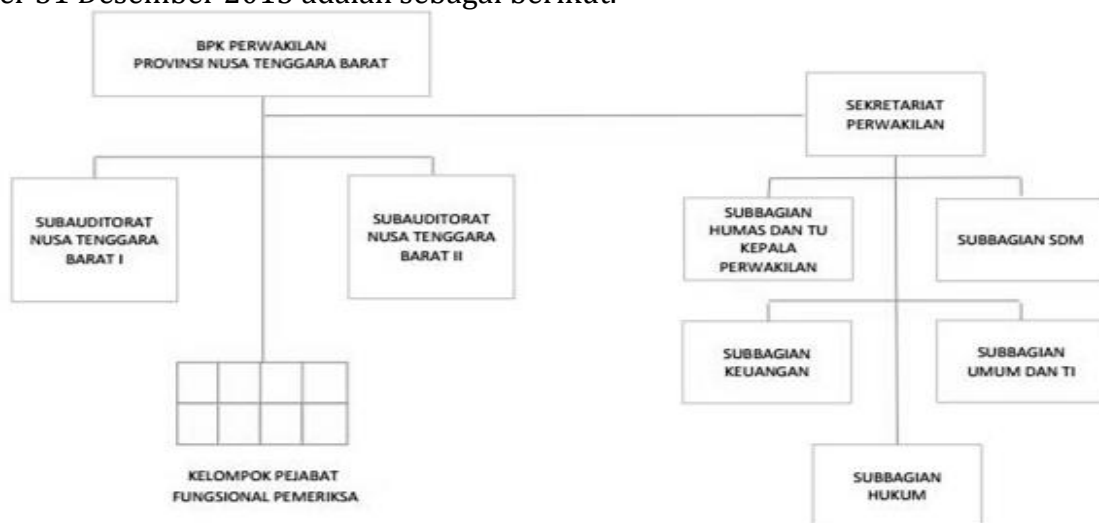
Tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB diatur dalam Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi NTB mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi NTB, kota/kabupaten di Provinsi NTB, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Adapun Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten yang merupakan wilayah BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah sebagai berikut.

1. Provinsi NTB;
2. Kota Mataram;
3. Kabupaten Lombok Barat;
4. Kabupaten Lombok Tengah;
5. Kabupaten Lombok Timur;
6. Kabupaten Lombok Utara;
7. Kabupaten Sumbawa Barat;
8. Kabupaten Sumbawa;
9. Kabupaten Bima;
10. Kota Bima;
11. Kabupaten Dompu.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB

BPK Perwakilan Provinsi NTB dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang membawahi satu orang Kepala Sekretariat Perwakilan, dua orang Kepala Subauditorat, lima orang Kepala Subbagian dan 32 orang Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa. Adapun Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi NTB

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-VIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Auditama Keuangan Negara VI yang terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi NTB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi NTB
- b. Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi NTB dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- f. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

2. Subauditorat NTB I

Subauditorat NTB I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk :

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh

- Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
 - l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

3. Subauditorat NTB II

Subauditorat NTB I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram, Kabupaten Dompu, Kota Bima, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk :

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB.

4. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sumber Daya Manusia (SDM) BPK Perwakilan Provinsi NTB per 31 Desember 2015 berjumlah 96 orang yang terdiri dari satu orang Kepala Perwakilan, satu orang Kepala Sekretariat Perwakilan, dua orang Kepala Subauditorat, lima orang Kepala Subbagian, 32 kelompok pejabat fungsional pemeriksa, 36 orang staf penunjang dan 19 orang tenaga kontrak.

Anggaran kegiatan BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp17.750.233.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.734.529.407,00 atau 94,28%.

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN
PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK)
BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2011-2015 menetapkan visi, misi, nilai dasar dan tujuan strategis BPK yaitu:

1. Visi

Mendukung BPK untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan melalui tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi NTB, Kota/Kabupaten di Provinsi NTB, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN VI. Adapun misi BPK Perwakilan NTB adalah:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
- Berperan aktif dalam mendeteksi dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan Negara.

2. Misi

Misi BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah sebagai berikut.

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Provinsi NTB;
- b. Memberikan usulan bahan pendapat atas hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTB untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Provinsi NTB; dan
- c. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan daerah di wilayah Provinsi NTB.

3. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misinya BPK Perwakilan Provinsi NTB menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut.

a. Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari

gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

b. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

c. Profesionalisme

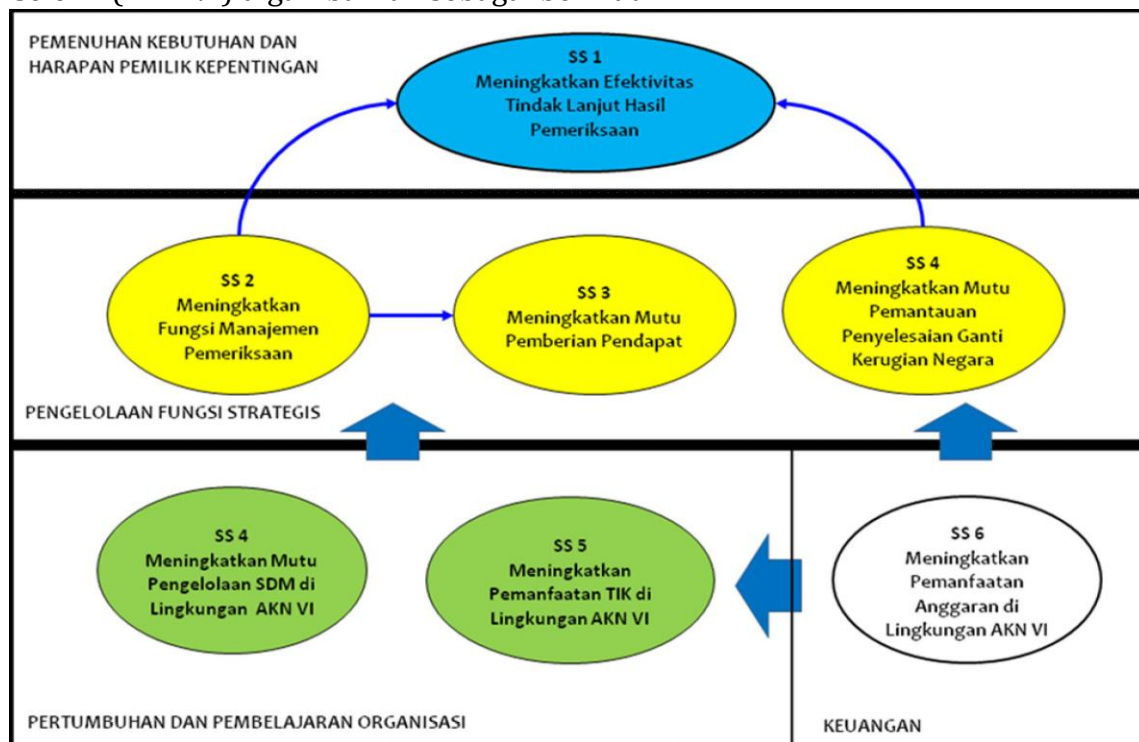
Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan Strategis

Melalui pelaksanaan misinya, BPK Perwakilan Provinsi NTB berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

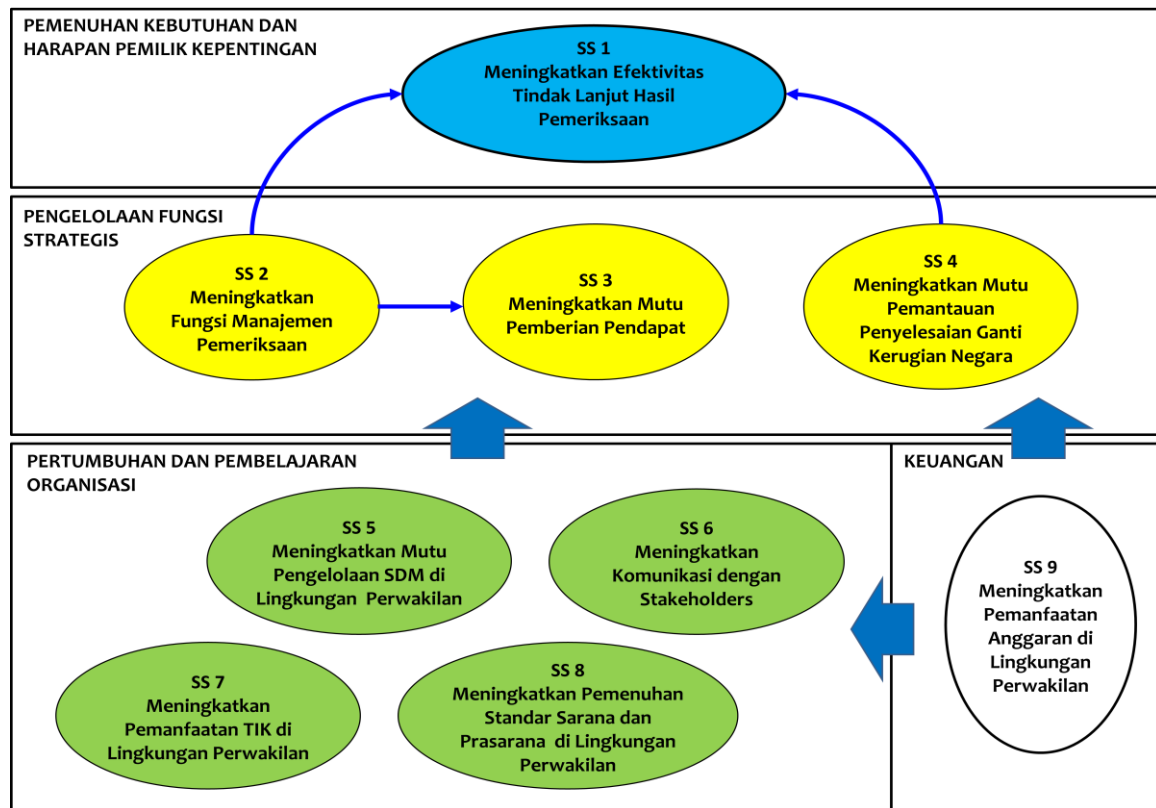
- a. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara/daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan melalui pemeriksaan keuangan daerah di wilayah Provinsi NTB;
- b. Mewujudkan pemeriksaan yang bernilai tinggi untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan; dan
- c. Mewujudkan efektivitas pengelolaan sumber daya dalam mendukung tata kelola organisasi di BPK Perwakilan Provinsi NTB

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, terdapat Peta Strategis BPK Eselon I (dhi. AKN VI) dan BPK RI Eselon II (dhi. Perwakilan). Adapun Peta Strategis BPK RI Eselon I (AKN VI) digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Peta Strategis BPK – Eselon I (AKN VI)

Sedangkan untuk perwakilan ditetapkan Peta Strategis BPK RI - Eselon II (Perwakilan) yang terdiri dari sembilan sasaran strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk sebagai berikut.



Gambar 3 . Peta Strategis BPK Perwakilan

B. PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK RI menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tiap-tiap satuan kerja. Perwakilan BPK sebagai satuan kerja tersendiri mempunyai 19 IKU dan atas masing-masing IKU tersebut ditetapkan target-target pencapaian kinerjanya. IKU beserta target pencapaian kinerjanya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon I.

BPK Perwakilan Provinsi NTB telah menetapkan target pencapaian kinerja pada masing-masing IKU dan dituangkan ke dalam PKPK BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi NTB selaku Pejabat Eselon II dan Tortama VI selaku Pejabat Eselon I pada tanggal 15 Desember 2014.

Berikut diuraikan Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2015 yang tertuang dalam PKPK, adalah:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2015
1	Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	62%
		1.2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau kerugian negara	60%
2	Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	2.1	Jumlah LHP yang diterbitkan	33
		2.2	Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan	3
		2.3	Ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan	100%
		2.4	Ketepatan waktu penyelesaian LHP	100%
		2.5	Pemenuhan <i>quality assurance</i> dalam pemeriksaan	100%
		2.6	Persentase Pemeriksaan yang memanfaatkan Portal <i>e-Audit</i>	82%
3	Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat	3.1	Jumlah usulan pendapat yang dimanfaatkan Dit. EPP	1
4	Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	4.1	Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang diterbitkan	22
		4.2	Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan kerugian Negara/daerah	100%
5	Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan	5.1	Jam pelatihan rata-rata per pegawai	40 jam
		5.2	Persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan	87%
6	Meningkatkan Komunikasi dengan <i>Stakeholders</i>	6.1	Jumlah <i>Media Relation</i> per tahun	2
7	Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan	7.1	Tingkat pemanfaatan aplikasi TIK	95%
		7.2	Persentase Instalasi Agen Konsolidator (AK)	90%
		7.3	Persentase Entitas yang Mentransfer Data via Agen Konsolidator (AK)	75%
8	Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan	8.1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Standar	90%
9	Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan	9.1	Tingkat pemanfaatan anggaran	90%
Jumlah		19		

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2015

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN PROVINSI NTB
(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB)

A. Pencapaian Skor BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2015

Pada tanggal 27 Januari 2016 bertempat di ruang Rapat PSMK 2 Kantor Pusat BPK RI di Jakarta, dilaksanakan kegiatan minggu validasi SIMAK Semester II Tahun 2015 untuk melakukan penginputan atas nilai (skor) pencapaian kinerja seluruh satuan kerja eselon II. Dari kegiatan tersebut pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB Tahun 2015 sebagai berikut ini:

IKU	Uraian	Target 2015	Skor 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Score Kinerja BPK Perwakilan Provinsi NTB						
SS.1 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan						
1.1	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	62%	105,00	85,12%	75,50%	56,49%
1.2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau kerugian negara	60%	0,00	0,00%	0,00%	0
SS.2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan						
2.1	Jumlah LHP yang diterbitkan	34	100,00	34	33	33
2.2	Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan	4	100,00	4	4	3
2.3	Ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan	100%	100,00	100%	100%	100%
2.4	Ketepatan waktu penyelesaian LHP	100%	100,00	100%	100%	100%
2.5	Pemenuhan <i>quality assurance</i> dalam pemeriksaan	100%	100,00	100%	100%	100%
2.6	Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan portal e-Audit	82%	105,00	86,36%	100%	N/A
SS.3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat						
3.1	Jumlah usulan pendapat yang dimanfaatkan Dit. EPP	1	105,00	2	2	1
SS.4 Meningkatkan Mutu Penyelesaian Ganti Kerugian Negara						
4.1	Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang diterbitkan	22	100,00	22	22	22
4.2	Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara	100%	100,00	100%	100%	100%
SS.5 Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan						
5.1	Jam pelatihan per pegawai	40 jam	105,00	82,72	86,63 jam	72,43 jam
5.2	Persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan	87%	105,00	96,88%	89,29%	86,67%
SS.6 Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholder						
6.1	Jumlah Media <i>Relation</i> per tahun	2	105,00	2,80	2,3	2
SS.7 Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan						
7.1	Tingkat pemanfaatan aplikasi TIK	100%	100,00	100%	92,65	93,04%
7.2	Persentase Instalasi Agen Konsolidator (AK)	90%	105,00	100%	100,00%	90,91%
7.3	Persentase entitas yang mentransfer data via Agen Konsolidator (AK)	75%	105,00	100%	81,82%	72,73%
SS.8 Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan						
8.1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Standar	90%	101,34	91,21%	87,19	85,70%

IKU	Uraian	Target 2015	Skor 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
SS.9 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di lingkungan Perwakilan						
9.1	Tingkat pemanfaatan anggaran	90%	104,75	94,28%	95,32%	91,58%
Skor Kinerja			94,43			

Tabel 2. Skor pencapaian kinerja tahun 2015

Dari Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2015 tersebut dapat dijelaskan pada bahasa selanjutnya.

B. SS.1 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Sasaran Strategis ini bertujuan agar BPK mampu memberikan rekomendasi bermutu yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. SS ini juga berupaya untuk meningkatkan efektivitas kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan BPK, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan dampak hasil pemeriksaan BPK.

Sasaran strategis 1 diukur melalui dua IKU yaitu:

- IKU 1.1 – Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
- IKU 1.2 - Persentase TL Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau Kerugian Negara.

1. **IKU 1.1 Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti**

Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan kepada entitas yang diperiksa periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 4.578 dengan rincian sebagai berikut:

No	Status Tindak Lanjut	Jumlah	Persentase
1	Selesai ditindaklanjuti	3.867	84,46%
2	Masih dalam proses/Belum selesai ditindaklanjuti	584	12,76%
3	Belum ditindaklanjuti	97	2,12%
4	Tidak dapat ditindaklanjuti	30	0,66%
Jumlah rekomendasi yang disampaikan		4,578	100%

Tabel 3 – Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Auditee pada BPK Perwakilan Provinsi NTB mencapai 85,12% dari target yang ditetapkan sebesar 62%. Dengan demikian untuk IKU 1.1, Perwakilan Provinsi NTB dapat mencapai target walau pun terdapat beberapa hambatan yang pada umumnya masih ada entitas yang kurang aktif dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pencapaian tahun 2015 meningkat sebesar 9,62% dari tahun sebelumnya.

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian Tahun		
			2015	2014	2013
1.1 Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti	62,00%	82,12%	105	105	105

Tabel4 - Perbandingan Capaian IKU 1.1 Tahun 2015, 2014 dan 2013

Jika dibandingkan dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015, realisasi tahun 2015 disajikan pada tabel berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
	2011	2012	2013	2014	2015		
1.1 Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti	25%	30%	40%	60%	30%	85,12%	283,73%

Tabel 5 - Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Tahun 2014 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

Dari Tabel 4 dan Tabel 5 menunjukkan bahwa realisasi IKU 1.1 Tahun 2015 mencapai 85,12% melebihi target yang ditetapkan pada Tahun 2015 yaitu 62%.

2. IKU Persentase TL Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau Kerugian Negara

Realisasi Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau kerugian negara sampai dengan Semester II Tahun 2015 sebesar 0%. Realisasi tersebut belum tercapai dikarenakan sampai dengan berakhirnya Semester II Tahun 2015 belum ada hasil pemeriksaan yang berindikasi unsur pidana dan/atau kerugian negara, sehingga IKU jumlah temuan berindikasi Tindak Pidana belum tercapai.

Perkembangan pencapaian IKU 1.2 dari tahun 2013 s.d. 2015 dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian Tahun		
			2015	2014	2013
1.2 Persentase TL Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau Kerugian Negara	60%	0%	0	0	0

Tabel 6 - Perbandingan Capaian IKU 1.2 Tahun 2015, 2014, dan 2013

Jika dibandingkan dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015, realisasi tahun 2014 disajikan pada tabel berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
	2011	2012	2013	2014	2015		
1.2 Persentase TL Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau Kerugian Negara	2	1	1	60%	2	0	n.a.

Tabel 7 - Perbandingan Realisasi IKU 1.2 Tahun 2014 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

Tabel 7 menunjukkan bahwa target IKU 1.2 RIR Tahun 2011-2015 masih diukur dari jumlah temuan berindikasi pidana yang diserahkan ke APH tiap tahun. Padahal pengukuran IKU 1.2 telah berubah dengan tidak hanya memperhitungkan jumlah temuan berindikasi pidana yang diserahkan ke APH, namun juga memperhitungkan jumlah pemenuhan perhitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli dengan satuan persentase. Jadi, realisasi IKU 1.2 pada Tahun 2015 kurang bisa diperbandingkan dengan RIR Tahun 2011-2015.

C. **SS.2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan**

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan NTB. Melalui SS ini, BPK Perwakilan NTB melakukan pengendalian mutu pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kode etik pemeriksa, dan kebutuhan pemangku kepentingan. SS ini juga mencakup upaya peningkatan lingkup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Melalui pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi, BPK berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan agar lebih efisien dan efektif melalui pengelolaan biaya pemeriksaan yang optimal dan pemanfaatan teknologi informasi. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. SS 2 diukur melalui enam IKU sebagai berikut:

- IKU 2.1 - Jumlah LHP yang diterbitkan
- IKU 2.2 –Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan
- IKU 2.3 – Ketepatan waktu pelaksanaan Pemeriksaan
- IKU 2.4 – Ketepatan waktu penyelesaian LHP
- IKU 2.5 - Pemenuhan *Quality Assurance* dalam Pemeriksaan
- IKU 2.6 – Persentase pemeriksaan yang memanfaatkan portal e-audit

1. IKU 2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan

Pelaksanaan Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi NTB telah sesuai dengan RKP baik dari Pemeriksaan Pendahuluan, LKPD, Kinerja dan PDTT. Jumlah LHP yang diterbitkan pada Tahun 2015 yakni sebanyak 34 LHP dan melebihi target yang ditetapkan. LHP tersebut terdiri dari 11 LHP LKPD, 4 LHP Kinerja dan 19 LHP DTT. Perkembangan realisasi IKU 2.1 Tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian Tahun		
			2015	2014	2013
2.1 Jumlah LHP Yang Diterbitkan	34	34	100	100	100

Tabel 8 - Perbandingan Capaian IKU 2.1 Tahun 2015, 2014 dan 2013

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 seperti pada tabel 8 terlihat adanya kenaikan pencapaian. Perbandingan realisasi IKU 2.1 Tahun 2015 dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 disajikan pada tabel 9 berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
	2011	2012	2013	2014	2015		
2.1 Jumlah LHP Yang Diterbitkan	30	22	33	33	22	34	154,54

Tabel 9 - Perbandingan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2015 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

2. IKU 2.2 Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan

Skor IKU 2.2 pada Tahun 2015 adalah sebesar 105 karena mampu merealisasikan 4 LHP Kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 4 LHP Kinerja. Tabel berikut menyajikan perbandingan capaian IKU 2.2 selama tiga tahun terakhir:

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian Tahun		
			2015	2014	2013
2.2 Jumlah LHP Kinerja Yang Diterbitkan	4	4	100	100	100

Tabel 10 - Perbandingan Capaian IKU 2.2 Tahun 2015, 2014 dan 2013

Perbandingan pencapaian IKU 2.2 tahun 2015 dengan target Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 disajikan pada Tabel 11 berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
	2011	2012	2013	2014	2015		
2.2 Jumlah LHP Kinerja Yang Diterbitkan	2	3	3	3	3	4	133,33

Tabel 11 - Perbandingan Realisasi IKU 2.2 Tahun 2015 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

3. IKU 2.3 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

Pengukuran IKU ini dilakukan atas kegiatan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Skor IKU 2.3 pada Tahun 2015 sebesar 100 karena sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Jadi, seluruh pemeriksaan telah dilaksanakan secara tepat waktu.

Perbandingan capaian IKU 2.3 tahun 2015 dengan capaian tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel 12.

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian Tahun		
			2015	2014	2013
2.3 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan	100%	100%	100	100	100

Tabel 12 - Perbandingan Capaian IKU 2.3 Tahun 2015, 2014 dan 2013

Sedangkan perbandingan capaian Tahun 2014 dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 13 berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
	2011	2012	2013	2014	2015		
2.3 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 13 - Perbandingan Realisasi IKU 2.3 Tahun 2015 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

Dari Tabel 13 menunjukkan bahwa realisasi IKU 2.3 Tahun 2015 mencapai 100% sesuai dengan target RIR pada Tahun 2015

4. IKU 2.4 Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP

SkorIKU 2.4 pada Tahun 2015 adalah sebesar 100 atau 34 LHP yang diterbitkan tepat waktu dari target yang ditetapkan. Perbandingan capaian IKU 2.4 Tahun 2015 dengan capaian Tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel 14.

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian Tahun		
			2015	2014	2013
2.4 Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP	100%	100	100	100	100

Tabel 14 - Perbandingan Capaian IKU 2.4 Tahun 2015, 2014 dan 2013

Sedangkan perbandingan capaian Tahun 2015 dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 15.

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
	2011	2012	2013	2014	2015		
2.4 Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100	100

Tabel 15 - Perbandingan Realisasi IKU 2.4 Tahun 2015 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

5. IKU 2.5 Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan

Dalam menjamin mutu pemeriksaan keuangan negara, BPK menetapkan sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan, standar dan pedoman pemeriksaan yang dilaksanakan secara konsisten. Pencapaian BPK RI Perwakilan Provinsi NTB telah memenuhi target sebesar 100% dari target 100%. Perbandingan capaian Tahun 2015 dengan capaian Tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian Tahun		
			2015	2014	2013
2.5 Pemenuhan Quality Assurance Dalam Pemeriksaan	100%	100%	100	100	100

Tabel 16 - Perbandingan Capaian IKU 2.5 Tahun 2014, 2013 dan 2012

Perbandingan capaian IKU 2.5 Tahun 2015 dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2014	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
	2011	2012	2013	2014	2015		
2.5 Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> Dalam Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%

Tabel 17 - Perbandingan Realisasi IKU 2.5 Tahun 2014 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

Tabel 17 menunjukkan bahwa capaian IKU 2.5 sudah mencapai 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2015 dimana seluruh pemeriksaan harus telah memenuhi *quality assurance* yang dipersyaratkan.

6. IKU 2.6 Persentase Pemeriksaan yang memanfaatkan Portal E-Audit

Realisasi Persentase pemeriksaan yang memanfaatkan Portal e-Audit sampai dengan Tahun 2015 sebesar 86,36%. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 82%. Pemeriksaan yang telah memanfaatkan portal e-audit sebanyak 19 pemeriksaan, terdiri dari:

- 1) Pemeriksaan Terinci LKPD sebanyak sebelas yaitu Pemerintah Provinsi NTB, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu.
- 2) Pemeriksaan Terinci Kinerja sebanyak satu yaitu Kinerja Pelayanan Kesehatan RSUD Selong pada Kabupaten Lombok Timur.
- 3) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sebanyak tujuh yaitu Pemeriksaan atas Operasional RSUD Kabupaten Dompu, Belanja Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial Kabupaten Sumbawa Barat, Belanja Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial Kabupaten Lombok Timur, Belanja Daerah Kota Bima, Belanja Daerah Kabupaten Bima, Belanja Daerah Provinsi NTB dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

D. SS.3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat

Sesuai UU No.15 Tahun 2006, BPK dapat memberikan rumusan bahan pendapat yang akan disampaikan BPK kepada pemilik kepentingan. Perwakilan Provinsi NTB memberikan masukan bahan pendapat agar dapat dimanfaatkan oleh Direktorat EPP, untuk selanjutnya disampaikan ke Badan.

1. IKU 3.1 Usulan Pendapat yang dimanfaatkan Direktorat EPP

Perwakilan NTB telah mengirimkan tiga usulan bahan pendapat kepada Direktorat EPP melalui Nota Dinas Nomor 431/ND/XIX.MTR/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yaitu (1) Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Daluwarsa dan (2) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada BPK. Sesuai dengan jawaban Nota Dinas dari Direktorat EPP Nomor 605/ND/XII.2/11/2015 tanggal 23 November 2015 disampaikan bahwa usulan bahan pendapat yang diterima sebagai bahan pendapat sebanyak satu usulan yaitu Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) Daluwarsa. Sedangkan usulan bahan pendapat Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada BPK, tidak dapat diterima sebagai bahan pendapat disebabkan permasalahan tersebut dapat direkomendasikan dalam pemeriksaan atau berkorespondensi dengan pemerintah daerah setempat. Usulan bahan pendapat selanjutnya yaitu Nomor 488/ND/XIX.MTR/12/2015 tanggal 3 Desember 2015 yaitu (3) Implementasi SAP Berbasis Akrual. Sesuai dengan jawaban Nota Dinas dari Direktorat EPP Nomor 09/ND/XII.2/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 disampaikan bahwa usulan bahan pendapat tersebut diterima sebagai capain IKU sehingga total bahan pendapat yang diterima sebagai capai IKU sebesar 2 (dua) bahan pendapat. Perbandingan capaian Tahun 2014 dengan capaian Tahun 2013 dan 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian Tahun		
			2015	2014	2013
3.1 Jumlah Usulan Pendapat Yang Dimanfaatkan Dit. EPP	1	2	105	105	100

Tabel 18 - Perbandingan Capaian IKU 3.1 Tahun 2015, 2014 dan 2013

Perbandingan capaian Tahun 2015 dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
	2011	2012	2013	2014	2015		
3.1 Jumlah Usulan Pendapat Yang Dimanfaatkan Dit. EPP	2	1	1	1	1	2	200,00%

Tabel 19 - Perbandingan Realisasi IKU 3.1 Tahun 2015 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

Tabel 19 menunjukkan bahwa capaian IKU 3.1 mencapai 200% melebihi dari target yang ditetapkan pada Tahun 2015 sebanyak 1 usulan pendapat.

E. **SS.4 Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara**

BPK Perwakilan NTB sebagai salah satu unsur pelaksana BPK, sesuai amanat UU bertugas memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah untuk dapat menjamin efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari jumlah laporan pemantauan maupun ketepatan waktu penyampaian laporan. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan pengukuran terhadap dua IKU, yaitu:

- IKU 4.1 mengenai Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan
- IKU 4.2 mengenai Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara (PKN)

1. **IKU 4.1 Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan**

Realisasi IKU 4.1 telah sesuai dengan target sebanyak 22 laporan PKN sehingga skor IKU 4.1 mencapai 100,00. Perbandingan pencapaian IKU 4.1 Tahun 2015 dengan capaian Tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian Tahun		
			2015	2014	2013
4.1 Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara Yang Diterbitkan	22	22	100	100	100

Tabel 20 - Perbandingan Capaian IKU 4.1 Tahun 2015, 2014 dan 2013

Perbandingan pencapaian Tahun 2014 dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
	2011	2012	2013	2014	2015		
4.1 Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara Yang Diterbitkan	11	22	22	22	22	22	100%

Tabel 21 - Perbandingan Realisasi IKU 4.1 Tahun 2014 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

Tabel 21 menunjukkan bahwa capaian IKU 4.1 sudah mencapai 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2015 sebanyak 22 laporan dari 11 entitas yang dilaksanakan pada Semester I dan II Tahun 2015

2. IKU 4.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara (PKN)

Capaian IKU 4.2 sebesar 100 diperoleh dari Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang direalisasikan sebesar 100% telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. LHpt periode Semester I 2015 telah disampaikan kepada Ditama Binbangkum pada tanggal 24 Juni 2015 sedangkan LHPT Semester II 2015 diserahkan pada tanggal 8 Januari 2016. Perbandingan pencapaian IKU 4.2 Tahun 2015 dengan capaian Tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian Tahun		
			2015	2014	2013
4.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara	100%	100%	100	100	100

Tabel 22 - Perbandingan Capaian IKU 4.2 Tahun 2014, 2013 dan 2012

Perbandingan capaian Tahun 2015 dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 23 berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
	2011	2012	2013	2014	2015		
4.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 23 - Perbandingan Realisasi IKU 4.2 Tahun 2014 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

Tabel 23 menunjukkan bahwa capaian IKU 4.2 sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% dari target pada Tahun 2015.

F. SS.5 Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset terpenting pada BPK Perwakilan NTB. Oleh karena itu, penambahan jumlah pemeriksa dan pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil

pemeriksaan yang berkualitas. Selain itu, BPK Perwakilan NTB perlu menyediakan suatu lingkungan kerjayang kondusif, untuk menarik orang-orang terbaik di bidangnya, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan pegawai. Untuk meningkatkan kualitas SDM yang memiliki kemampuan, kompetensi, dedikasi dan pengabdian dalam pelaksanaan tugas, dilakukan pengukuran IKU 5.1 mengenai Jam Pelatihan Rata-rata Pegawai dan IKU 5.2 mengenai Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan.

1. IKU 5.1 Jam Pelatihan Rata-Rata Pegawai

Sesuai dengan SPKN setiap pegawai harus mencapai jam pelatihan selama 80 jam dalam dua tahun atau 40 jam dalam satu tahun. Pada Tahun 2015 Skor IKU 5.1 sebesar 105,00 dimana realisasi jam pelatihan rata-rata pegawai mencapai 82,72 jam atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 40 Jam. Perbandingan capaian IKU 5.1 Tahun 2015 dengan capaian Tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian Tahun		
			2015	2014	2013
5.1 Jam Pelatihan Rata-Rata Per Pegawai	40	87,72	105	105	105

Tabel 24 - Perbandingan Capaian IKU 5.1 Tahun 2014, 2013 dan 2012

Sedangkan perbandingan capaian Tahun 2015 dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 25 berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
	2011	2012	2013	2014	2015		
5.1 Jam Pelatihan Rata-Rata Per Pegawai	40 jam	40 jam	40 jam	40 jam	40 jam	87,72 jam	219,3%

Tabel 25 - Perbandingan Realisasi IKU 5.1 Tahun 2013 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

Tabel 25 diatas menunjukkan bahwa capaian IKU 5.1 sangat baik yaitu sebesar 219,3% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2015.

2. IKU 5.2 Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan

Skor IKU 5.2 tahun 2015 yaitu sebesar 100 melebihi target yang ditetapkan sebesar 87%. Perbandingan capaian IKU 5.2 Tahun 2015 dengan capaian Tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel 26 berikut:

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian Tahun		
			2015	2014	2013
5.2 Persentase Pemeriksa Yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan	87%	96,88%	105	102,63	101,96

Tabel 26 - Perbandingan Capaian IKU 5.2 Tahun 2015, 2014 dan 2013

Sedangkan perbandingan capaian Tahun 2015 dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 27 berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
	2011	2012	2013	2014	2015		
5.2 Persentase Pemeriksa Yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan	75%	80%	85%	87%	87%	96,88%	111,36%

Tabel 27 - Perbandingan Realisasi IKU 5.2 Tahun 2015 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

G. SS.6 Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders

1. Jumlah Media Relation Per Tahun

Media *relation* yang dilaksanakan di perwakilan bertujuan untuk mensosialisasikan/memperkenalkan BPK dalam rangka meningkatkan awarness stakeholders atas tugas dan fungsi BPK. Untuk Jumlah Media Relation per tahun telah memenuhi target. Kegiatan media relation telah dilaksanakan Perwakilan Provinsi NTB sebanyak empat kali yang terdiri dari:

- 1) Media Workshop Media Workshop dengan tema "Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua dan Implikasinya terhadap Opini LKPD" yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2015 di Ruang Rapat Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- 2) Wawancara Ketua BPK RI didampingi oleh Kepala Perwakilan dengan Media Pers dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2015;
- 3) Konferensi Pers dengan Anggota VI BPK RI yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB;
- 4) Press Lunch dengan tema "Fungsi Humas Perwakilan dalam meningkatkan Peran BPK atas Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara" yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015.

Perbandingan capaian IKU 6.1 Tahun 2015 dengan capaian Tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel 28 berikut:

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian Tahun		
			2015	2014	2013
5.2 Persentase Pemeriksa Yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan	2%	2,8%	105	105	100

Tabel 28 - Perbandingan Capaian IKU 6.1 Tahun 2015, 2014 dan 2013

Sedangkan perbandingan capaian Tahun 2015 dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 29 berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
	2011	2012	2013	2014	2015		
5.2 Persentase Pemeriksa Yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan	2	2	2	2	2	2,8	140%

Tabel 29 - Perbandingan Realisasi IKU 5.2 Tahun 2015 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

Tabel 29 diatas menunjukkan bahwa capaian IKU 6.1 sangat baik yaitu sebesar 140% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2015

H. SS.7 Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan

Kualitas sistem teknologi informasi dan komunikasi BPK berpengaruh langsung terhadap kinerja BPK. Oleh karena itu setiap proses bisnis yang ada di BPK diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sasaran strategis 7 diukur melalui 3 IKU.

- IKU 7.1 tentang Persentase Aplikasi TIK yang Dimanfaatkan Secara Optimal
- IKU 7.2 instalasi Agen Konsolidator (AK)
- IKU 7.3 entitas yang mentransfer data via Agen Konsolidator (AK)

1. IKU 6.1 Persentase Aplikasi TIK yang Dimanfaatkan Secara Optimal

Tingkat pencapaian IKU pemanfaatan TIK BPK Perwakilan NTB pada Tahun 2015 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Aplikasi TIK yang telah dimanfaatkan sebanyak 15 aplikasi yang terdiri dari: SMP, SI RKSP, SIMAK, SIMAKBMN, SAI, RKAKL, GPP, SPM, SISDM, Website Perwakilan, SIK, SAKPA, SIPUSPA, SINTAG, dan Portal e-audit. Perbandingan capaian IKU 7.1 Tahun 2015 dengan capaian Tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel 30 berikut:

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian Tahun		
			2015	2014	2013
7.1 Persentase Aplikasi TIK Yang Dimanfaatkan Secara Optimal	90%	100%	105	100,71	103,38

Tabel 30 - Perbandingan Capaian IKU 7.1 Tahun 2015, 2014 dan 2013

Sedangkan perbandingan capaian Tahun 2015 dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 31 berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
	2011	2012	2013	2014	2015		
6.1 Persentase Aplikasi TIK Yang Dimanfaatkan Secara Optimal	90%	90%	90%	92%	95%	100%	105,26%

Tabel 31 - Perbandingan Realisasi IKU 7.1 Tahun 2015 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

Capaian IKU 7.1 Tahun 2015 sebesar 105 melebihi dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2015 sebesar 95%.

2. IKU 6.2 Persentase Instalasi Agen Konsolidator (AK)

Persentase Instalasi Agent Konsolidator (AK). IKU ini bertujuan untuk mendorong satker menindaklanjuti MoU dengan pemasangan Agen Konsolidator di komputer entitas. Instalasi Agent Konsolidator (IAK) adalah aplikasi yang dipasang di komputer milik entitas yang berfungsi untuk memperoleh data dari entitas dan secara otomatis mengirim data elektronik ke pusat data BPK melalui internet. Sampai dengan berakhirnya Semester II 2015, semua entitas telah terhubung dengan pusat data BPK.

IKU 7.2 ini baru diterapkan mulai Tahun 2013. Perbandingan pencapaian IKU 7.2 tahun 2015 dengan capaian tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel 32.

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian Tahun		
			2014	2013	2012
7.2 Persentase Instalasi Agent Konsolidator (AK)	90	100%	105	100	105

Tabel 32 - Perbandingan Capaian IKU 7.2 Tahun 2015, 2014 dan 2013

Perbandingan pencapaian Tahun 2015 dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 33 berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
	2011	2012	2013	2014	2015		
7.2 Persentase Instalasi Agent Konsolidator (AK)	NA	NA	54,54%	75%	90%	100%	111,11%

Tabel 33 - Perbandingan Realisasi IKU 7.2 Tahun 2015 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

3. IKU 7.3 Persentase Entitas yang Mentransfer Data via Agen Konsolidator (AK)

IKU ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan AK yang telah terpasang melalui transfer data entitas sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk proses audit. Pada Perwakilan NTB dari sebelas entitas seluruhnya telah mengirimkan data-data elektronik kepada BPK secara online. Dengan demikian persentase entitas yang mentransfer data via Agent Konsolidator (AK) adalah sebesar 100%. Capaian tersebut telah melebihi target IKU 75%.

IKU 7.3 ini baru diterapkan mulai Tahun 2015. Perbandingan capaian IKU 7.3 Tahun 2015 dengan capaian Tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel 34.

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian Tahun		
			2015	2014	2013
7.3 Persentase entitas yang mentransfer data via Agent Konsolidator (AK)	75%	100%	105	105	105

Tabel 34 - Perbandingan Capaian IKU 7.3 Tahun 2015, 2014 dan 2013

Sedangkan perbandingan capaian Tahun 2015 dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 35 berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
	2011	2012	2013	2014	2015		
7.3 Persentase entitas yang mentransfer data via Agent Konsolidator (AK)	NA	NA	54,54%	75%	90%	100%	111,11%

Tabel 35 - Perbandingan Realisasi IKU 7.3 Tahun 2015 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

I. SS.8 Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan

Standar Sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK demi terwujudnya suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK.

1. IKU 8.1 Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja

Tingkat pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana kerja adalah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal No. 299/K/X-XIII.2/8/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Panduan Standar Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan BPK. Tingkat pemenuhan standar sarana dan prasarana di BPK RI Perwakilan Provinsi NTB pada tahun 2015 telah sesuai mencapai 101,34%. Pencapaian tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 96,88%.

Perbandingan capaian IKU 8.1 Tahun 2015 dengan capaian Tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel 36.

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian Tahun		
			2015	2014	2013
8.1 Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja	90%	91,21%	101,34	96,88	95,22

Tabel 36 - Perbandingan Capaian IKU 8.1 Tahun 2015, 2014 dan 2013

Sedangkan perbandingan capaian Tahun 2015 dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 37 berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
	2011	2012	2013	2014	2015		
8.1 Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja	90%	90%	90%	90%	90%	91,21%	101,34%

Tabel 37 - Perbandingan Realisasi IKU 8.1 Tahun 2015 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

J. SS.9 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Sasaran strategis ini merupakan upaya Perwakilan NTB dalam mendukung pengelolaan keuangan BPK yang efisien, efektif dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Pencapaian sasaran ini tercermin melalui IKU 9.1 tentang tingkat penyerapan anggaran.

1. IKU 9.1 Tingkat Pemanfaatan Anggaran

Pada Tahun 2015, skor IKU 9.1 adalah sebesar 104,75 dengan tingkat pemenuhan anggaran sebesar 94,28% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Anggaran Perwakilan yang terealisasi sebesar Rp16.7345.529.407,00 dari total anggaran perwakilan sebesar Rp17.750.233.000,00. Perbandingan capaian IKU 9.1 Tahun 2015 dengan capaian Tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel 38.

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian Tahun		
			2015	2014	2013
9.1 Tingkat Pemanfaatan Anggaran	90%	94,28%	104,75	105	105

Tabel 38 - Perbandingan Capaian IKU 9.1 Tahun 2015, 2014 dan 2013

Sedangkan perbandingan capaian Tahun 2015 dengan target dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 39 berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2014 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
	2011	2012	2013	2014	2015		
9.1 Tingkat Pemanfaatan Anggaran	85%	85%	85%	90%	85%	94,28%	110,92%

Tabel 39 - Perbandingan Realisasi IKU 9.1 Tahun 2015 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

BAB IV PENUTUP

A. Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan NTB Secara Umum

LAK BPK Perwakilan NTB ini merupakan sumbangan penyusunan LAK Auditama Keuangan VI BPK RI sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan NTB mengalami kenaikan dalam pencapaian skor kinerja, yaitu dari 92,90 pada tahun 2014 menjadi 94,43 pada tahun 2015. Perolehan skor kinerja tersebut merupakan formulasi dari skortujuh Sasaran Srategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Skor
1	Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	74,55
2	Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	100,45
3	Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat	105,00
4	Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	100,00
5	Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan	105,00
6	Maningkatkan Komunikasi dengan Stakeholder	105,00
7	Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan	103,00
8	Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana & Prasarana di Lingkungan Perwakilan	101,34
9	Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan	104,75
SKOR KINERJA		94,43

Tabel 40-Skor Sasaran Strategis BPK Perwakilan NTB Tahun 2015

B. Penyebab Secara Umum Terjadinya Kenaikan Skor

BPK Perwakilan NTB mengalami kenaikan dalam pencapaian skor kinerja beberapa IKU pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya capaian beberapa Sasaran Strategis antara lain yang berkaitan dengan rekomendasi yang di tindaklanjuti, Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan, Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal eAudit, Jumlah media relation yang dilaksanakan dan persentase penuhi standar sarana dan prasarana kerja.

C. Kendala Utama Penyebab Terjadinya Penurunan Skor

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan/kendala yang disebabkan oleh proses interaksi yang cukup lama apabila sasaran strategis melibatkan dua atau lebih satuan kerja eselon II dan/atau pihak di luar BPK (hal tersebut tampak pada IKU 1.2).

D. Strategi Pemecahan Masalah Serta Rencana Aksi yang Akan Diambil Terkait Pemenuhan Target Periode Berikutnya

BPK Perwakilan akan mengevaluasi kinerja Tahun 2015 dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk dapat meningkatkan skor kinerja di tahun yang akan datang. Serta mempertahankan kinerja yang telah sesuai atau melebihi target pada kinerja periode berikutnya. Atas kendala-kendala yang ada, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan melakukan evaluasi ke dalam dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar target-target yang ada dapat segera tercapai.

Penyusunan LAK BPK Perwakilan NTB ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.



**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT UNIT ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Unit Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi NTB
Tahun Anggaran : 2015

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	62%	82,12%	105
		1.2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau kerugian negara	60%	0%	0
2	Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	2.1	Jumlah LHP yang diterbitkan	34	34	100
		2.2	Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan	4	4	100
		2.3	Ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan	100%	100%	100
		2.4	Ketepatan waktu penyelesaian LHP	100%	100%	100
		2.5	Pemenuhan <i>quality assurance</i> dalam pemeriksaan	100%	100%	100
		2.6	Persentase pemeriksaan yang memanfaatkan portal e-audit	82%	86,36%	105
3	Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat	3.1	Jumlah usulan pendapat yang dimanfaatkan Dit. EPP	1	2	105
4	Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	4.1	Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang diterbitkan	22	22	100
		4.2	Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara	100%	100%	100
5	Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan	5.1	Jam pelatihan per pegawai	40 jam	82,72 jam	105
		5.2	Persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan	87%	96,88%	105
6	Meningkatkan Komunikasi dengan <i>Stakeholders</i>	6.1	Jumlah Media <i>Relation</i> per tahun	2	2,8	105
7	Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan	7.1	Tingkat pemanfaatan aplikasi TIK	95%	100,00%	100
		7.2	Persentase Instalasi Agen Konsolidator (AK)	90%	100,00%	105
		7.3	Persentase entitas yang mentransfer data via Agen Konsolidator (AK)	75%	100,00%	105
8	Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan	8.1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Standar	90%	91,21%	101,34
9	Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan	9.1	Tingkat pemanfaatan anggaran	90%	94,28%	104,75
Jumlah		16				

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : Rp16.734.529.407,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : Rp17.750.233.000,00